

## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEDESAAN

**Sintha Natalia Pramudya Wardani**

*sinthanatalia6@gmail.com*

**Wahidahwati**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research aimed to determine whether Village Fund Management had been effective in supporting the village development and find out some factors that affected Village Fund Management's effectiveness in supporting its development at Betro village, Sedati, Sidoarjo during 2022-2023. This can be seen in the planning, implementation, and accountability process involving the villagers. The research was descriptive-qualitative. Moreover, the data collection technique used random sampling, with a questionnaire distributed to respondents as supporting data. Some interviews, observations, and documentation were applied as the instruments in the data collection technique. The interviews were conducted with the head of the village and its government head of the section. In line with that, there were 50 villagers as the sample which came from some RT/RW of Betro villages. Furthermore, the data analysis technique used the process of data reduction, presentation, and conclusion. The result showed that the Musrembang activity at Betro village had fulfilled the requirements, which could be seen from villagers' participation and suggestions for its activity. At the village, from its implementation, there was a surplus. It meant the realization that the village's total assets were a little lower than the total expenditure that had already been planned.*

*Keywords: effectiveness, village fund management, village development*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengelolaan Dana Desa sudah Efektif dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Desa Betro serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2022-2023. Hal tersebut dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang selalu mengikutsertakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diambil dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling yaitu kuesioner dibagikan kepada Masyarakat sebagai data pendukung. Informan wawancara dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa dan Kasi Pemerintahan. Jumlah responden pada kuesioner sebanyak 50 warga yang terdiri dari beberapa RT/RW desa Betro tersebut. Teknik analisis data dilakukan dengan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan musrenbang Desa Betro dinilai sudah memenuhi ketentuan dilihat dari partisipasi dan usulan rencana kegiatan oleh masyarakat. Pada pelaksanaannya, Desa Betro mengalami surplus, artinya realisasi total belanja desa lebih sedikit dari total belanja yang dianggarkan. Desa Betro juga melakukan tahap penyelesaian dengan menyusun laporan pertanggungjawaban guna untuk mengevaluasi dan meningkatkan Pembangunan fisik di Desa Betro. Oleh karena itu, pengelolaan dana Desa Betro dapat dikatakan sudah efektif.

Kata Kunci: efektivitas, pengelolaan dana desa, pembangunan desa

### PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan saat ini, desa mempunyai peran yang sangat terjangkau dan strategis dalam mendukung pemerintah daerah dalam pengelolaan administrasi, pelaksanaan

pembangunan, pengembangan masyarakat, dan proses pemberdayaan masyarakat. Semua ini terjadi sebagai bentuk langkah konkrit pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Oleh karena itu, otonomi desa merupakan suatu kebutuhan yang harus diwujudkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa setiap daerah berhak atas otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan undang-undang ini, pemerintah memberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab kepada setiap daerah untuk mengatur urusan dan kepentingannya guna mencapai pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan, mengelola sumber daya alam, dan memungkinkan pelaksanaannya secara lebih efektif. Dalam hal ini Mardiasmo (2002:59) menyatakan bahwa tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian daerah melalui tiga tugas pokok: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, 2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, 3) Memperkuat dan menciptakan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat (publik) dalam proses pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja diperlukan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan keuangan desa dengan baik.

Otonomi daerah diatur dalam peraturan pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan dan pelaksanaan daerah secara lebih efektif. Menurut Blakely dalam Kuncoro (2004), Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan menciptakan pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pembangunan ekonomi. Ini adalah proses yang mendorong aktivitas (pertumbuhan ekonomi) di wilayah tersebut. Ukuran keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, daerah, dan sektor.

Berdasarkan Undang-Undang Pembangunan Desa No. 6 Tahun 2014, kami menjawab kebutuhan desa, membangun infrastruktur, memanfaatkan sumber daya, alam dan lingkungan secara berkelanjutan, serta mendukung infrastruktur lokal dan pembangunan ekonomi desa. Hal ini dikembangkan dalam musyawarah desa berdasarkan hasil kesepakatan. Unit desa mempunyai kewenangan belanja yang besar, termasuk hak untuk mengembangkan wilayah desa guna memperkuat pemberdayaan masyarakat desa.

Besarnya Dana Desa yang diterima desa adalah 60% dari dana perimbangan fiskal pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran belanja pendapatan desa untuk penggunaan Dana Desa pada sektor Pembangunan meliputi pembangunan pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. 40% untuk program Bantuan Langsung Tunai yang bertujuan untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrim di desa. Penggunaan dana desa oleh pemerintah harus efektif sehingga tercapainya tujuan sebelumnya dengan musyawarah yaitu tercapainya rencana yang didasarkan pada efektivitas program kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan organisasi atau kelompok dalam kaitannya dengan keberhasilan atau hasil yang dicapai.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang mengamalkan prinsip otonomi daerah dan menyelenggarakan pemerintahan yang kreatif dan inovatif, bertujuan untuk meningkatkan potensi desa melalui pemajuan pembangunan daerah, didorong dan diberikan berbagai peluang. Sesuai Peraturan Bupati, ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 berlaku untuk Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, dan terkini Peraturan Pemerintah Nomor 6 telah beberapa kali direvisi. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dan tata cara penyaluran ke setiap desa di kabupaten Sidoarjo sesuai Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 tentang Tata Cara Alokasian, Penyaluran, Pemanfaatan,

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dan peraturan bupati tentang penetapan besaran dana desa.

Upaya tersebut dilaksanakan melalui pengalokasian dana desa dengan fokus pada pengentasan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan antar desa. Dana desa tersebut didasarkan pada Keputusan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang perubahan atas Keputusan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penghitungan Dan Penyaluran Besaran Dana Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020. Kabupaten Sidoarjo terdapat 18 kecamatan, 31 kelurahan dan 322 desa. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah Desa Betro. Desa Betro merupakan salah satu desa yang memanfaatkan pembangunan dan infrastruktur secara maksimal untuk meningkatkan pertanian. Desa Betro memiliki luas 179 hektar, ketinggian rata-rata 4-5 meter, serta terletak pada 107 derajat BT dan -73 derajat LS. Jika dilihat dari besaran anggaran yang diberikan kepada desa melalui Dana Desa di Desa Betro meningkat menjadi Rp 2.622.424.776 pada tahun 2022 dan diperkirakan mengalami peningkatan mencapai Rp 3.441.824.511 pada tahun 2023.

Menarik untuk diteliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan dana desa hal yang menarik untuk diteliti. Sampai saat ini, beberapa penelitian telah dilakukan dengan menggunakan variabel yang berbeda. Salah satunya adalah penelitian Darson (2018) yang menyelidiki dampak efektivitas pengelolaan alokasi sumber daya desa terhadap peningkatan pelaksanaan pembangunan di Desa Pola, Kabupaten Muna. Penelitiannya menyimpulkan bahwa ketiga langkah ini dapat diselesaikan dengan sukses. Namun hal tersebut belum efektif karena kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, Desa Betro Kecamatan Sedati merupakan salah satu desa sasaran pengembangan di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, sangat menarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dalam mendukung pembangunan pedesaan pada tahun 2022/2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih jauh kondisi yang terkait dengan pelaksanaan penggunaan dana desa oleh pemerintah desa Betro di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan dalam konteks pembangunan. Di Desa Betro Kecamatan Sedati, pembangunan akan dilakukan dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* menjelaskan adanya hubungan antara kesuksesan organisasi dan kepuasan pelanggannya. Kesuksesan menunjukkan bahwa manajemen dan kelompok pimpinan mengembangkan manfaatnya. Selain itu, filosofi tentang teori *stewardship* didasarkan pada sifat manusia, seperti integritas, dapat dipercaya, dan berperilaku jujur terhadap orang lain. Menurut teori ini, ada hubungan yang kuat antara kepuasan pelanggan dan kesuksesan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya, dan rakyat bertanggung jawab sebagai pemilik sumber daya. Pemerintah dan rakyat mencapai kesepakatan berdasarkan kepercayaan kolektif. Organisasi sektor publik berfungsi untuk menyediakan layanan kepada masyarakat umum dan dapat dipertanggung jawabkan atas hasilnya. Dengan demikian, dapat diterapkan pada model kasus organisasi sektor publik yang menggunakan teori *stewardship*, yang menganggap ada hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dan kepuasan pemilik.

Keterkaitan antara teori *stewardship* dengan penelitian ini adalah pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rakyat akan merasa puas dengan kinerja pemerintah jika pemerintah dapat mencapai tujuan ini. Penelitian ini akan melihat apakah perilaku pemerintah Desa Betro telah sesuai dengan teori *stewardship*, dilihat dari bagaimana pemerintah Desa Betro mengelola

dana desa untuk menunjang Pembangunan yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan Masyarakat Desa Betro.

### **Konsep Efektivitas**

Asal kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mencapai suatu tujuan tertentu. Efektivitas selalu menyangkut hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, dievaluasi dengan cara yang berbeda, dan berkaitan erat dengan efisiensi. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai, dengan kata lain proses kegiatan mencapai tujuan. Dalam mengetahui tingkat efektivitas suatu individu, kelompok, organisasi, atau bahkan suatu negara, harus membandingkan kebenaran atau keakuratannya dengan kesalahan yang dilakukan. Othenk (2008:4) Efektivitas adalah penggunaan sejumlah sarana, prasarana, dan sumber daya yang ditentukan secara sadar untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau individu.

### **Indikator Efektivitas**

Mengukur efektivitas tidaklah mudah karena dilihat dari berbagai sudut pandang dan berbeda-beda tergantung orang yang menafsirkannya. Dengan membandingkan rencana yang dikembangkan dengan hasil aktual, Anda dapat mengukur tingkat efektivitasnya. Menurut Ravianto (dalam Masruri, 2017:4) efisiensi adalah cara kerja dilakukan dengan baik dan sejauh mana orang mengeluarkan uang sesuai dengan yang diharapkan. Artinya merupakan pengukuran yang efektif jika pekerjaan dapat diselesaikan sesuai rencana dari segi waktu, biaya dan kualitas. Dari indikator efektivitas tersebut dapat dikategorikan menjadi indikator: (1) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai, (2) Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan strategis, (3) Analisis program yang kuat, (4) Persiapan program yang akurat, (5) Sarana dan prasarana yang tersedia, (6) Sistem pelaksanaan, pemantauan dan pengelolaan kebijakan program pendidikan.

### **Konsep Pengelolaan**

Kepala desa mempunyai kewenangan kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa. Lapananda (2016:21-22) dalam bukunya tentang hukum pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa, pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan kekuasaan otoritas Dengan kata lain, kewenangan untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa dengan melakukan tindakan pendapatan menjadi pemasukan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa. Tery (dalam Torang, 2014:166) membagi empat fungsi dasar manajemen (pengelolaan), yaitu: 1) perencanaan (*planning*), 2) pengorganisasian (*organizing*), 3) pengarahan (*actuating*), dan 4) pengawasan (*controlling*). Fungsi dasar manajemen bersifat universal di mana pun dan di organisasi mana pun. Oleh karena itu, agar manajemen organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, maka pemimpin organisasi harus mampu menjalankan fungsi-fungsi dasar tersebut.

### **Konsep Desa**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang pernah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah masyarakat Indonesia, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk pengakuan negara terhadap desa, maka diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan desa, terutama dalam rangka memperkuat kedudukan desa dan kewenangan desa serta penguatan status desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Diperlukan kebijakan penataan dan regulasi desa yang akan dilaksanakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyebutkan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

susunan asli berdasarkan hak usul yang khusus. Ide dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah**

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) memuat daftar secara sistematis dan rinci mengenai sumber-sumber pendapatan negara dan alokasi belanja negara dalam jangka waktu tertentu. APBN merupakan alat untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, mencapai stabilitas perekonomian, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah dan desa.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Selain itu, anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan tingkat pendapatan dan belanja, sebagai bantuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, sebagai otoritas pembelanjaan di masa depan, dan sebagai sumber untuk pengembangan ukuran kinerja yang terstandarisasi, sebagai alat untuk mencapai motivasi karyawan dan koordinasi alat seluruh kegiatan unit kerja yang berbeda (Mardiasmo, 2002:13).

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

APBDes merupakan peraturan desa yang berisi pertanggungjawaban dari pemerintah manajemen desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa dan pemerintah tentang segala kegiatan atau aktivitas desa yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan pelaksanaannya dalam bentuk perencanaan program yang didanai oleh dana desa. Begitu pula dengan pembagian sumber pendapatan dan retribusi desa dalam satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes tersebut akan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bekerja sama dengan BPD menetapkan APBDes setiap tahun berdasarkan peraturan desa. Rancangan APBDes tersebut akan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pembentukan APBDes didasarkan pada rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan oleh RKP desa, yaitu Peraturan Desa (PERDES).

### **Dana Desa**

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) provinsi untuk desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Sesuai Permendes Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 4 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

Dana desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan diberikan kepada setiap desa sebagai sumber pendapatan desa. Perencanaan program dan kegiatan dipersiapkan terlebih dahulu dan dilaksanakannya musyawarah perencanaan dan pembangunan desa dilakukan dengan melibatkan perwakilan BPD, LPMD, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat umum. Kebijakan ini sekaligus menggabungkan dan mengoptimalkan seluruh sistem alokasi anggaran yang ada mulai dari pemerintah hingga desa.

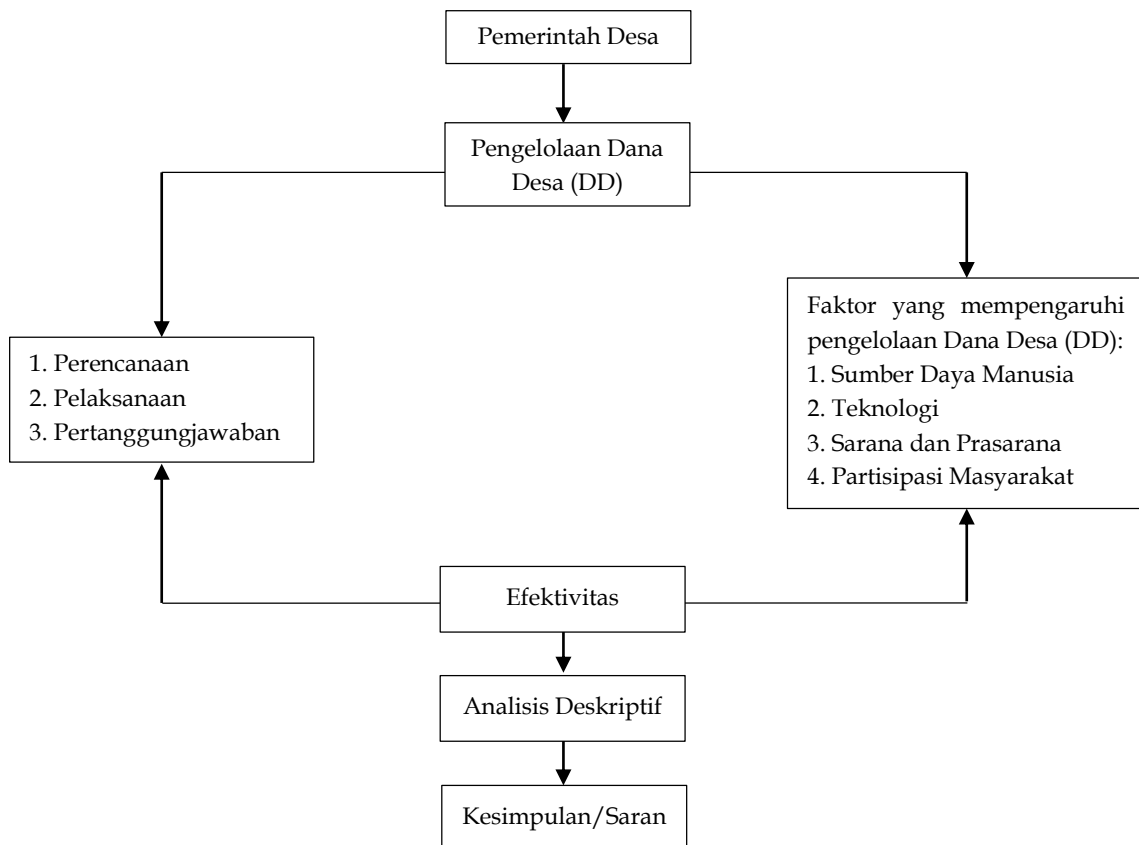
### **Konsep Pembangunan**

Pembangunan adalah suatu konsep dimana perubahan direncanakan dengan tujuan utama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraannya, dan meningkatkan kualitas manusia. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan terwujudnya apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia, yang merupakan konsep normatif. Hal ini dapat diartikan bahwa

pembangunan dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya, oleh karena itu pembangunan ekonomi secara umum merupakan suatu proses yang mengarah pada peningkatan pendapatan riil per kapita dapat didefinisikan sebagai Pertumbuhan populasi negara dalam jangka panjang dengan sistem kelembagaan yang lebih baik.

### Rerangka Pemikiran

Pengelolaan Dana Desa di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada Keputusan Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Kemampuan menjalankan otonomi agar desa dapat berkembang. Hal ini terutama menyangkut aspek perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas. Kondisi ini sedang diteliti di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Fokusnya adalah pada seberapa efektif pengelolaan alokasi dana desa dengan meningkatnya pembangunan di desa Betro, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pengelolaan dana desa seiring dengan meningkatnya pembangunan di desa Betro. Berdasarkan uraian di atas, maka rerangka pemikiran dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



**Gambar 1**  
Rerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode, langkah, dan prosedur yang menggabungkan data dan informasi yang diperoleh dari responden sebagai subjek yang mampu mengungkapkan jawaban dan perasaannya sendiri guna memperoleh gambaran umum yang holistik tentang apa yang diteliti.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data adalah metodologi yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas suatu penelitian dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, metode, atau teori. Melalui triangulasi data, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner.

### **Observasi**

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data secara sengaja, terarah dan terencana sesuai rencana dengan mengamati segala peristiwa dan fenomena yang terjadi serta mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian. Sedangkan menurut Hadi (1987) menjelaskan observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang terjadi pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan melalui observasi langsung terhadap kondisi objek dan mengamati langsung mengenai dampak Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

### **Wawancara**

Metode penelitian wawancara adalah pengumpulan data berupa pertemuan tatap muka antara dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan gagasan dengan menggunakan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna mengenai suatu topik tertentu (Prastowo, 2010). Dalam metode ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan terkait mengenai dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan studi efektivitas anggaran Alokasi Dana Desa terhadap kualitas Pembangunan daerah di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

### **Dokumentasi**

Pada tahap teknis dokumentasi, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa penelitian-penelitian terdahulu seperti buku dan jurnal, serta mendokumentasikan data-data tersebut baik berupa dokumen resmi, ilustrasi, maupun laporan ilmiah terdahulu.

### **Kuesioner**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket atau kuesioner. Biasanya angket atau kuesioner ini digunakan pada jumlah responden yang banyak dan memiliki kemampuan membaca serta menulis yang baik. Pada penelitian ini, kuesioner digunakan untuk mendapatkan data pendukung dari jawaban-jawaban narasumber. Pengumpulan data didasarkan pada penyebaran kuesioner maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan terstruktur bersifat tertutup dengan jawaban yang telah disediakan dan diisi oleh responden dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang disajikan oleh peneliti dalam kuesioner:

**Tabel 1**  
**Angket Kuesioner**

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i turut serta dalam musyawarah perencanaan program Desa Betro?		
2.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui besaran jumlah anggaran dana desa yang diterima oleh Desa Betro?		
3.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui program apa saja yang menggunakan dana Desa Betro?		
4.	Apakah pemerintah Desa Betro turut serta mengajak masyarakat untuk saling mengawasi dalam proses pelaksanaan program desa?		
5.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui bahwa Desa Betro memiliki media untuk mengakses informasi tentang program desa yang dilaksanakan?		
6.	Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, apakah pemerintah Desa Betro sudah mempergunakan dana desa yang diterima dengan baik?		
7.	Apakah program Desa Betro yang telah terlaksana bermanfaat bagi Bapak/Ibu/Saudara/i?		
8.	Jika diberikan nilai, seberapa efektif kah program-program desa yang telah dilaksanakan pemerintah desa menurut Bapak/Ibu/Saudara/i?		

Sumber: Ismail (2022)

### Satuan Kajian

Dalam penelitian ini unit penelitian mengungkapkan apa yang akan peneliti bahas dalam penelitiannya. Topik penelitian ini meliputi evaluasi pengelolaan ADD untuk mencapai transparansi, efektivitas, dan partisipasi. Oleh karena itu, karena penelitian ini berbasis pengelolaan maka unit penelitian ini terdapat 3 proses yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, dan 3) pertanggungjawaban.

### Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dievaluasi secara deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan proses penelitian menggunakan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dari pelaku yang dapat diamati. Proses analisis data menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau validasi.

### Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu berbentuk kata-kata, bukan angka, dan dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dokumentasi, rekaman dan biasanya di proses dengan mencatat, mengetik, penyuntingan, atau alih tulis (Miles, 1992:15).

### Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dalam reduksi data, hal yang difokuskan adalah pada tujuan yang dicapai (Sugiyono, 2007:93).

### Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk deskripsi sederhana, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain-lain. Jenis representasi data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah narasi (Sugiyono, 2017).

### Kesimpulan

Kesimpulan diambil dengan menentukan makna data yang disajikan. Setelah data-data terkumpul selanjutnya akan dilakukan penarikan dari kesimpulan kemudian diambil dari



data yang dikumpulkan dan ditinjau keabsahannya. Penarikan kesimpulan dari kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti sebagai data pendukung dari hasil wawancara dilakukan dengan membuat diagram perbandingan presentase setuju dan tidak setuju. Oleh karena itu, peneliti merumuskan perhitungan yang akan dimasukkan dalam diagram dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

- P = Butir Jawaban
- F = Frekuensi Jawaban
- N = Total Responden

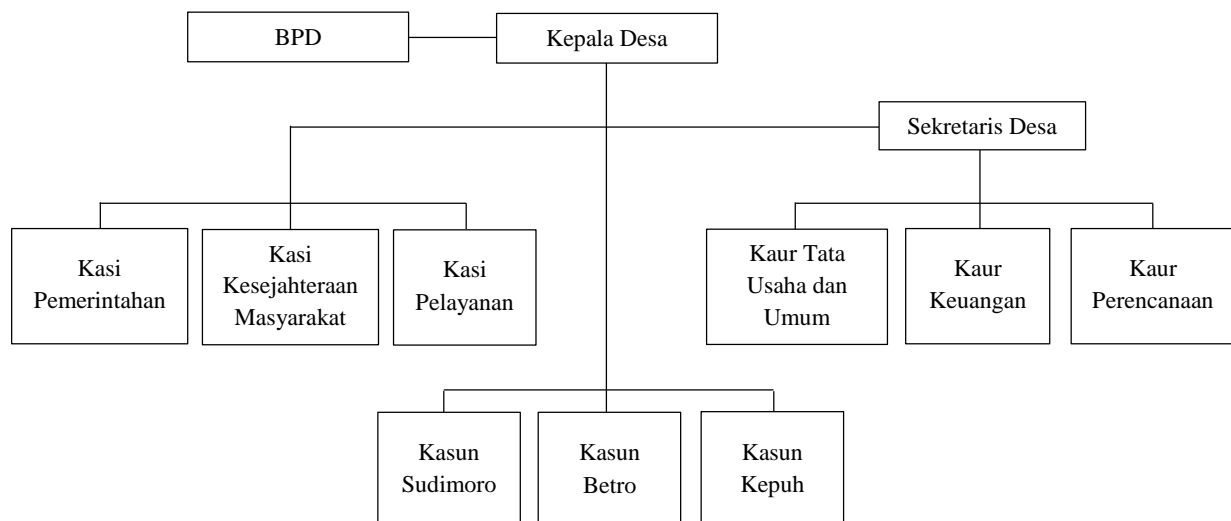
## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Desa Betro

Secara geografis Desa Betro terletak pada posisi  $-73^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $107^{\circ}$  Bujur Timur. Luas Desa Betro ini adalah 179,000000 Ha. Di Desa ini terletak sebuah Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 40 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data monografi Desa Betro tercatat jumlah penduduk Desa Betro berjumlah 8.333 jiwa yang terdiri dari 4.487 jiwa adalah penduduk jenis kelamin laki-laki dan 3.846 jiwa adalah berjenis kelamin perempuan.

### Struktur Pemerintahan Desa Betro

Struktur Organisasi Desa Betro untuk pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan fisik memiliki tim pengawasan yang terdiri dari BPD, kasi pemberdayaan desa (PMD) camat, dinas PMD inspektorat Kabupaten, dan tim pelaksana seperti Kasun Sudimoro, Kasun Betro, Kasun Kepuh, Kasi Kesejahteraan, dan ketua RW. Struktur ini memastikan bahwa tujuan peningkatan pembangunan fisik di Desa Betro dapat dicapai dengan baik. Gambar berikut menunjukkan struktur organisasi Desa Betro:



**Gambar 2**  
**Struktur Pemerintahan Desa Betro**  
 Sumber: Profil Desa Betro Tahun 2024

## Gambaran Umum APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah sistem pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. APB Desa dibuat sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan pemerintah Desa dan harus dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tujuan ini, peraturan harus dibuat peraturan desa tentang bagaimana menerapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah jumlah total dari rencana anggaran keuangan pemerintah desa yang dibuat untuk membiayai semua program kerja pemerintah yang diwajibkan. Kepala desa, perangkat desa, masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyetujui dan membuat peraturan untuk data APB Desa tahun anggaran 2022-2023.

## Karakteristik Responden

### Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2  
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	25	50%
Perempuan	25	50%
Total	50	100%

Sumber: Data Penelitian, diolah 2024.

Berdasarkan tabel 2, masyarakat Desa Betro yang menjadi responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25 orang atau 50% dan masyarakat berjenis kelamin perempuan sebanyak 25 atau 50%.

### Karakteristik Responden Menurut Usia

Tabel 3  
Karakteristik Responden Menurut Usia

Usia	Jumlah	Presentase
20 - 30 tahun	29	58%
31 - 40 tahun	8	16%
41 - 50 tahun	7	14%
51 - 60 tahun	5	10%
61 - 70 tahun	1	2%
Total	50	100%

Sumber: Data Penelitian, diolah 2024.

Berdasarkan tabel 3, masyarakat Desa Betro yang menjadi responden berusia 20-30 tahun adalah sebanyak 58%, usia 31-40 tahun sebanyak 16%, usia 41-50 tahun sebanyak 14%, usia 51-60 tahun sebanyak 10%, dan usia 61-70 tahun sebanyak 2%.

### Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Tabel 4  
Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SMP	1	2%
SMA	36	72%
D3	2	4%
S1	11	22%
Total	50	100%

Sumber: Data Penelitian, diolah 2024.

Berdasarkan tabel 4, masyarakat Desa Betro yang menjadi responden berpendidikan terakhir SMP sebanyak 2%, berpendidikan terakhir SMA sebanyak 72%, berpendidikan terakhir D3 sebanyak 4%, dan berpendidikan terakhir S1 sebanyak 22%.

### Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

Tabel 5  
Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Presentase
Karyawan Perusahaan Swasta	9	18%
Karyawan Perusahaan Pemerintah	3	6%
Pelajar	14	28%
Purnawirawan/Pensiunan	1	2%
Pedagang Barang Kelontong	4	8%
TNI	18	36%
Guru Swasta	1	2%
Total	50	100%

Sumber: Data Penelitian, diolah 2024.

Berdasarkan tabel 5, masyarakat Desa Betro yang menjadi responden bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta sebanyak 18%, karyawan perusahaan pemerintah sebanyak 6%, pelajar sebanyak 28%, purnawirawan/pensiunan sebanyak 2%, pedagang barang kelontong sebanyak 8%, TNI sebanyak 36%, dan guru swasta sebanyak 2%.

### Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Betro

Pengelolaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan di Desa Betro Kecamatan Sedati adalah proses atau suatu rangkaian tindakan atau pengaturan pengendalian, pengaturan, dan pengurusan penyelenggaraan anggaran dana desa untuk keperluan fisik dan non-fisik dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan pertanggung jawaban yang diberikan kepada masyarakat Desa Betro untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang konsisten, merata, dan terarah sesuai dengan perencanaan program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

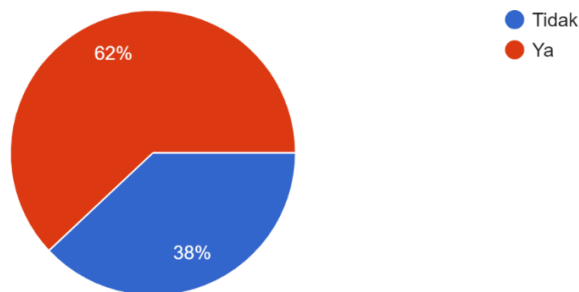
Anggaran Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Desa Betro pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 2.599.515.374 dan pada tahun 2023 sebesar Rp 2.120.137.313. Keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola pendapatan desa dan memaksimalkan apa yang dibutuhkan masyarakat memengaruhi tingkat efektivitas Dana Desa. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa di Betro efektif atau tidak, peneliti menyelidiki berbagai elemen, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

### Tahap Perencanaan Dana Desa

Perencanaan Dana Desa adalah tahapan pertama ini dimulai dengan pertemuan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Desa, dikenal sebagai Musyawarah Desa. Musyawarah Desa berlanjut untuk memeriksa berbagai masalah dan rencana kegiatan serta menerima saran dan usulan dari warga. Akhirnya, usulan yang paling banyak disampaikan ke Musrenbang Desa. Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) adalah kumpulan usulan yang akhirnya membentuk gambaran umum dari usulan dan kritikan kebutuhan seluruh masyarakat. Setelah disetujui tim pelaksana, yang terdiri dari kepala desa sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa sebagai Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa sebagai Kepala Urusan Keuangan, dan lembaga desa, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk anggaran yang diprioritaskan pada APBDes kecamatan baru bisa turun. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Aniyu sebagai kepala desa Betro yang Mengatakan:

"Pembahasan dana desa sebelum dilaksanakannya musrenbang desa, perangkat desa mengumpulkan warga terlebih dahulu melalui pemberitahuan forum untuk membahas masalah dan rencana kegiatan pembangunan dari suara usulan warga yang paling banyak mendapatkan suara terbanyak yang akan di tuangkan pada DURK. Warga Betro dalam usulan gagasan maupun pengumpulan warga berjalan lancar meskipun ada yang tidak ikut, sedangkan warga lainnya mudah diatur dan partisipasinya baik. Sebelum dilaksanakannya musrenbang desa kita musdus dulu setelah itu dibawa ke musrenbang untuk menyusun RKP dan RAPBDes semua usulan masyarakat ini ditampung melalui RT/RW setempat. Nah ini musrenbang masuknya di RPJMD. Nanti yang mendapatkan suara terbanyak akan dituangkan pada DURK. Setelah itu terjadi, kita bikin lagi Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 tahun sekali. Disitu kita lihat anggaran, jadi program itu jangka panjang dulu yang 6 tahun, kita usulkan semua usulan kita tampung setelah itu kita buat pembangunan jangka pendek mana prioritas yang lebih penting harus kita lakukan terlebih dahulu".

Hasil penelitian diatas dapat diperkuat dengan hasil angket yang telah dibagikan oleh peneliti kepada Masyarakat Desa Betro, dengan rincian sebagai berikut:



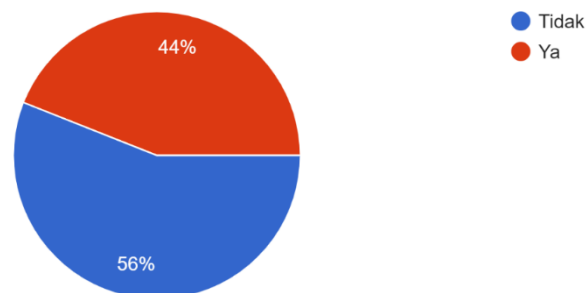
**Gambar 3**  
Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa  
Sumber: Data Penelitian, diolah 2024

Dari diagram diatas, dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{31}{50} \times 100\%$$

P = 62% untuk presentase jawaban Ya, 38% lainnya menjawab Tidak.

Dapat terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa sangat banyak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya partisipasi masyarakat pada musrenbang adalah sebanyak 62% dan ini sejalan dengan hasil wawancara dari informan bahwa banyak masyarakat yang turut berpartisipasi dalam musrenbang.



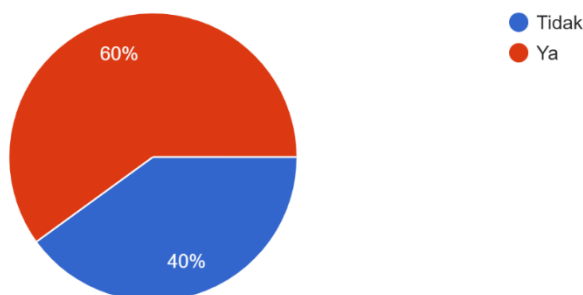
**Gambar 4**  
Informasi Anggaran Dana Desa  
Sumber: Data Penelitian, diolah 2024

Dari diagram diatas, dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{22}{50} \times 100\%$$

P = 44% untuk presentase jawaban Ya, 56% lainnya menjawab Tidak.

Dari perhitungan tersebut dapat dilihat, hanya 44% masyarakat yang mengetahui besaran dana yang diterima oleh desa sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 56%. Hal ini tidak sesuai dengan partisipasi masyarakat dimana dalam musrenbang, banyak masyarakat yang mengikuti musyawarah tersebut.



**Gambar 5**  
**Informasi Program Desa**  
**Sumber: Data Penelitian, diolah 2024**

Dari diagram diatas, dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{30}{50} \times 100\%$$

P = 60% untuk presentase jawaban Ya, 40% lainnya menjawab Tidak.

Dari perhitungan tersebut, terlihat bahwa masyarakat dominan mengetahui tentang program-program desa yang akan dilaksanakan yaitu sebesar 60%. Hal ini sejalan dengan partisipasi masyarakat pada musyawarah perencanaan pengembangan desa dimana banyak masyarakat yang mengikuti kegiatan musrenbang tersebut juga mengetahui tentang program-program desa.

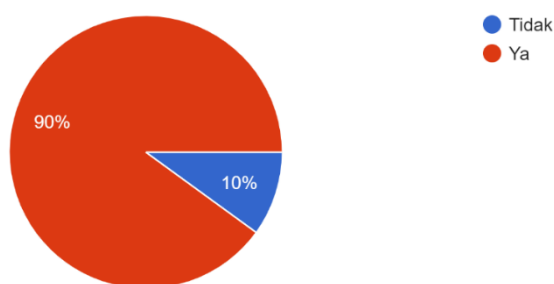
### Tahap Pelaksanaan Dana Desa

Tahapan pelaksanaan dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Betro bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan Pengelolaan Dana Desa sudah bagus, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan fisik yang ada di Desa Betro yaitu Pembangunan jalan antar kelurahan dan jembatan beton. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Betro yaitu Bapak Aniyu yang menyatakan bahwa:

*“Sebelum Musdus, menampung aspirasi terus ke tenaga Kerja bakti, proyek pada karya, meningkatkan kesejahteraan pembinaan wirausaha, pembinaan ekonomi (Permenkeu, Permendes) simkedes permendes skala desa RKP, APDes 1 tahun anggaran desa. Di karenakan di desa Betro ini tahun 2023 ini sudah menjadi desa mandiri maka dari itu bisa mendapat keuntungan 2 kali di bagi menjadi 60% tahap I dari desa 40% tahap II dana desa 2022 baru mandiri proses dari desa maju ke desa mandiri ke dari kepdes. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan baik, jangan dipanggil untuk bekerja, dipanggil pada saat musrenbang saja untuk sosialisasi juga sudah baik”.*

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pembuatan laporan APBDes tidak dicantumkan mengenai rincian program-program yang dijalankan oleh desa Betro. Hal ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat, yaitu bapak Evi Sukarijanto yang menyatakan bahwa:

*“Memang sih mbak, untuk rincian laporan APBDes tidak bisa kami berikan karena belum seluruh warga paham mengenai program-program yang diadakan oleh pemerintah desa. Tapi hal tersebut tidak mengurangi partisipasi warga dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat setuju dan suka dengan kinerja Kepala Desa sekarang selain peduli dengan kondisi sosial masyarakat, merakyat, mendengarkan keluhan dan aspirasi yang dibutuhkan masyarakat, juga tidak pilih kasih dan selalu adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari negara”.*



**Gambar 6**  
**Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pelaksanaan Program Desa**  
Sumber: Data Penelitian, diolah 2024

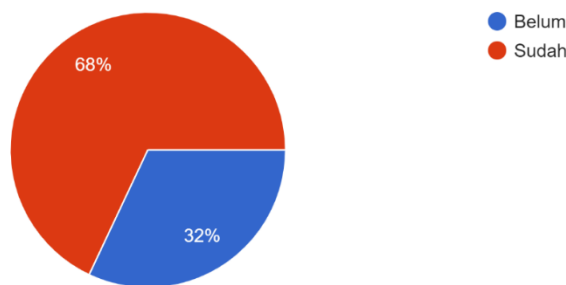
Dari diagram diatas, dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{45}{50} \times 100\%$$

P = 90% untuk presentase jawaban Ya, 10% lainnya menjawab Tidak.

Dari perhitungan tersebut, terlihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan jalannya program desa adalah sebesar 90%. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan informan bahwa masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program desa.

Semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik serta tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik maupun non fisik di Desa Betro dapat dikatakan sudah efektif.



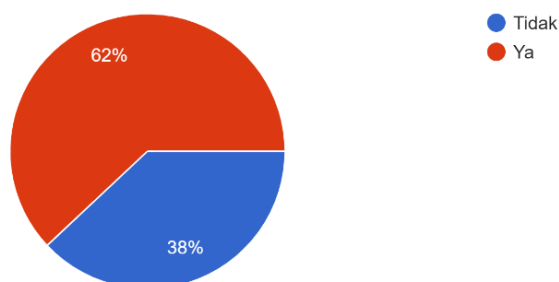
**Gambar 7**  
**Partisipasi Masyarakat tentang Penggunaan Dana Desa**  
**Sumber: Data Penelitian, diolah 2024**

Dari diagram diatas, dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{34}{50} \times 100\%$$

P = 68% untuk presentase jawaban Sudah, 32% lainnya menjawab Belum.

Dari perhitungan tersebut menunjukkan 68% masyarakat Desa Betro yang menyatakan bahwa dana desa sudah dipergunakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa maupun program-program desa yang dijalankan. Hal ini sejalan dengan pendapat informan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa telah terselesaikan dengan baik dan efektif.



**Gambar 8**  
**Informasi Program Desa Melalui Media**  
**Sumber: Data Penelitian, diolah 2024**

Dari diagram diatas, dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{31}{50} \times 100\%$$

P = 62% untuk presentase jawaban Ya, 38% lainnya menjawab Tidak.

Dari perhitungan tersebut, terlihat bahwa sebanyak 62% masyarakat Desa Betro mengetahui bahwa terdapat media yang dimiliki oleh desa untuk mengakses berbagai program yang dimiliki oleh Desa Betro. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang dilakukan sudah transparan dan hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan.

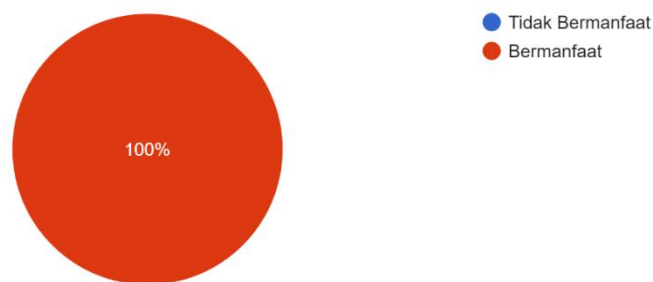
### Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Betro Kecamatan Sedati, pada tahapan pertanggung jawaban ini dikatakan sudah efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di susun oleh pemerintah desa, penyusunan laporan pertanggung Jawaban ini disusun dan diselesaikan oleh pihak yang berasal dari pihak pemerintah atau lembaga Desa Betro selalu ada transparansi kepada masyarakat, tetapi tidak secara rinci mengenai anggaran program-program yang dijalankan sehingga masyarakat tetap mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, laporan pertanggungjawaban Desa Betro memang disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab tim pelaksana kegiatan, dan tidak disusun oleh pihak lainnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Betro yaitu bapak Evi Sukarijanto yang menyatakan bahwa:

*"Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Betro memang sudah disusun oleh pemerintah desa selaku penanggungjawab kegiatan yang ada didesa dikarenakan kualitas sumberdaya aparatur desa kurang memadai untuk menyusun LPJ, tetapi saya selaku sekdes harus terus berkembang mempelajari dan mengelola fasilitas yang diberikan karena ini merupakan hal yang baru bagi pemerintah desa, khususnya di Desa Betro ini. LPJ Betro dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun".*

Laporan LPJ dilakukan 2 kali dalam satu tahun pada bulan Juni dan Desember. Laporan pertanggung jawaban sendiri dibuat oleh tim pelaksana kegiatan yang kemudian diverifikasi oleh bendahara dan sekretaris desa serta disetujui oleh kepala desa. Setelah melewati proses tersebut, laporan pertanggung jawaban yang telah dibuat dikirim langsung ke inspektorat melalui kecamatan secara online dan tanpa melalui rapat. Pada desa Betro, terdapat panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari tokoh masyarakat dan tenaga ahli dibidang pekerjaan tersebut. PPHP berhak menolak ataupun menerima hasil pekerjaan tim pengelola kegiatan atau TPK.

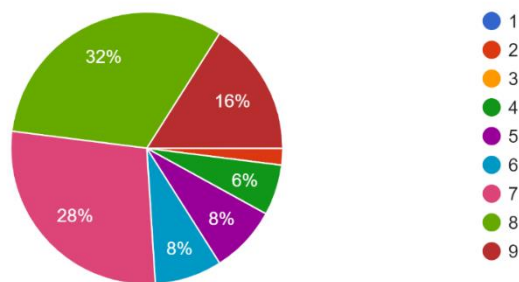
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Betro telah menyelesaikan tahapan pertanggung jawaban secara administrasi dengan baik, dan LPJ yang merupakan hasil evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa, telah dilakukan secara efektif oleh pemerintah desa sendiri dan bersama masyarakat Desa Betro.



**Gambar 9**  
Kebermanfaatan Program Desa  
Sumber: Data Penelitian, diolah 2024

Diagram diatas menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan di Desa Betro seluruhnya telah bermanfaat bagi para masyarakat. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh informan bahwa dari evaluasi kegiatan desa bersama masyarakat desa telah dilakukan secara efektif oleh pemerintah desa sendiri dan bersama masyarakat Desa Betro.





**Gambar 10**  
**Nilai Keefektifan Program Desa**  
**Sumber: Data Penelitian, diolah 2024**

Diagram diatas menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat memberikan nilai 8 dari nilai maksimal 9 terhadap program-program desa. Hal ini berarti masyarakat menilai bahwa program desa yang telah dilaksanakan sudah cukup efektif dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Betro.

### **Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Dana Desa Betro Sarana dan Prasarana**

Pemerintah Desa Betro selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan perangkat desa maupun masyarakatnya dengan menyediakan baik sarana maupun prasarana yang mendorong pelaksanaan kegiatan program yang didanai DD. Seperti contoh pembelian untuk perangkat Desa yaitu komputer, hard disk portable, mesin printer sekaligus bisa digunakan berguna dalam menyelesaikan tugasnya. Pemerintah Desa Betro sangatlah terlihat dalam mendukung sarana dan prasarana menunjang pelaksanaan program kegiatan yang ada di Desa Betro secara optimal dan efisien.

### **Partisipasi Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Betro sudah cukup baik. Hal ini dari setiap proses tahapan sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Betro, dilakukan dengan tiga proses tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban sudah baik, dimana terkait dengan adanya sosialisasi dalam setiap musrenbang desa sehingga partisipasi masyarakat memberikan usulan serta kritik dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga dan individual berdampak pula keefektifan pencapaian tujuan dalam pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Betro. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Aniyu selaku Kepala Desa Betro yaitu:

*“Saya sebagai kepala desa betro bersyukur mbak dan berterimakasih kepada warga saya dengan aspirasi tanggapannya untuk ikut serta dalam musyawarah dan perkumpulan umum untuk membahas perkembangan Desa. Aspirasi, saran, dan kritikan adalah bentuk kepedulian mereka agar menjadi desa yang maju”.*

Dibuktikan juga ikut sertanya masyarakat Desa Betro dalam proses kegiatan gotong royong dalam pembangunan Desa Tahun 2022-2023 sebagian besar didanai oleh Dana Desa. Dapat disimpulkan untuk Partisipasi Masyarakat Desa Betro sangat bagus dan sangat membantu pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa. Adanya ikatan yang saling menguntungkan yaitu dengan masyarakat menyumbang tenaga dan makanan serta waktu untuk pelaksanaan program yang mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat.

## Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa Betro Sumber Daya Manusia

Jika dilihat rata-rata pendidikan terakhir aparat Desa Betro adalah SMA atau sederajat berpengaruh pada proses kerjanya terbilang cukup terbukti dari adanya proses pelaporan yang cukup, dalam membuat proses pertanggung yang terkadang terhambat. Penyebab minimnya pengetahuan perangkat desa terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Betro. Hal ini menandakan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan Perangkat Desa yang menjadikan faktor utama penyebab kinerja proses pengelolaan Dana Desa menjadi tidak maksimal. Apalagi sekretaris desa yang memang pengetahuan dan pengalamannya masih terbatas. Hal tersebut dibenarkan oleh kepala desa bapak Aniyu yang mengatakan:

*“Memang benar, sekretaris desa yang saat ini pengetahuan dalam pengelolaan keuangan yang ada sangkut pautnya dengan mengoperasikan komputer memang kurang, ya dimaklumi lah mbak karena beliau pengalamannya kurang dan faktor usia juga mempengaruhi tetapi beliau saat ini sudah mencoba untuk praktek meskipun belum bisa secara total sanggup. Jadi kita juga bergantian membantu dan membagi tugas agar target yang akan di capai bisa terpenuhi”.*

Penentuan keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai tujuan yang diinginkan ada hal penting yaitu latar belakang pendidikan aparatur desa termasuk hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan jelas akan berpengaruh pada tingkat kinerja pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa.

## Teknologi

Desa Betro sudah dimasuki era perkembangan teknologi namun pengguna teknologi justru tidak maksimal dan sebagian masyarakat saja, belum semua. Misal dalam penggunaan komputer. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasi Pemerintah yaitu bapak Evi Sukarijanto:

*“kalau teknologi sekarang sudah mengikuti jaman, sekarang setiap aparatur desa disinikan terbagi ada 11 aparatur ada kasun 3, TU, kesejahteraan masyarakat, disitu semua sekarang sudah mulai dibekali dengan IT jadi setiap aparatur desa itu harus memegang 3 IT jadi kita harus bisa mengikuti teknologi. Disamping itu jugakan model pelaporan IT semua menggunakan aplikasi, bahkan desa sekarang sudah mempunyai website disitu sudah mencakup tentang pembangunan desa, pelaporan keuangan desa, laporan pelaksanaan desa. Hampir semuanya pakai mulai dari kasie pemerintahan, kasie pelayanan umum, kaur TU, kaur keuangan, kaur perencanaan semua pegang aplikasi. Ya otomatis untuk teknologi mau tidak mau harus mengikuti jaman. Bahkan sekarang teman-teman sudah di bekal hard disk portable untuk semua aplikasi itu.”*

Pemberian perubahan untuk kehidupan masyarakat tak terkecuali pemerintah desa yang sanggup memanfaatkan teknologi secara benar sehingga berpengaruh pencapaian hasil yang maksimal membantu desa agar lebih maju dan berkembang.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan Desa Betro, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Desa Betro telah mencapai tingkat keberhasilan yang baik dalam menerapkan efektivitas pengelolaan dana desa. Pemerintah Desa Betro selalu melibatkan semua kelompok masyarakat dalam pembuatan APB Desa dan memberikan informasi kepada masyarakat melalui banner yang dipasang di tempat yang strategis, (2) Dana Desa Betro yang diperoleh dari pemerintah pusat pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 871.578.000 dan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 636.793.000. sedangkan dana Desa Betro yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 390.842.379 dan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 418.641.662. Dari dana tersebut, Desa Betro

mengalami surplus, (3) Pada tahap perencanaan dana desa, diadakan pertemuan oleh masing-masing kepala desa yang akan melangsungkan musyawarah desa. Setelah itu, perangkat desa mengumpulkan warga melalui pemberitahuan forum untuk mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kegiatan musrenbang di Desa Betro dinilai cukup memenuhi ketentuan dan menyentuh esensi yang terkandung dari kegiatan tersebut, (4) Pada tahap pelaksanaan kegiatan dana desa, Desa Betro memiliki Sisa Lebihan Pembiayaan Anggaran (SILPA), artinya realisasi total belanja Desa Betro lebih sedikit dari total belanja yang dianggarkan, (5) Desa Betro melakukan tahap penyelesaian dengan menyusun laporan pertanggungjawaban sebanyak dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juni dan Desember serta telah terselesaikan dengan baik dan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana Desa Betro telah efektif dilakukan, (6) Desa Betro memiliki faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan Pembangunan di Desa Betro, yaitu sarana prasarana dan partisipasi masyarakat, (7) Desa Betro juga memiliki faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa, yaitu dari faktor sumber daya manusia dan teknologi.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dikembangkan dalam penelitian yang akan datang. Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: (1) Dalam penelitian ini, objek penelitian hanya menggunakan satu lokasi desa. Sehingga tidak dapat dibuat perbandingan antara desa satu dengan desa yang lain mengenai proses pengelolaan dana desa serta hasil penelitian yang didapatkan kurang luas, (2) Peneliti tidak bisa terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, sehingga peneliti hanya terbatas mengetahui realisasi dari pengelolaan dana desa.

### **Saran**

Penulisan saran menggunakan narasi. Berikut adalah contoh penulisan saran. Saran yang bisa diberikan antara lain untuk meningkatkan kepuasan kerja adalah: (1) Peneliti selanjutnya dapat menambahkan objek penelitian yaitu dengan menambahkan lokasi desa yang akan diteliti agar penelitian selanjutnya mendapatkan hasil yang lebih luas dan dapat membandingkan proses pengelolaan dana desa satu dengan yang lainnya, (2) Peneliti selanjutnya dapat andil dan terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa agar peneliti dapat lebih mudah dalam mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Darson 2018. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna). *Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo Kendari*.
- Hadi, S. 1987. *Metodologi Rerearch*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Ismail, E. 2022. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Tingkat Desa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu). *Institut Agama Islam Negeri Palopo*.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi dan peluang*.
- Lapananda, Y. 2016. *Hukum pengelolaan keuangan desa*. RMBooks.
- Mardiasmo, M. 2002. Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 6(1).
- Masruri, M. 2017. Analisis efektivitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM-MP). *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2): 363-393.

- Miles, M.B.D.A. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, 2747-2829.
- Othenk, S. 2008. *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*. Alfabeta. Bandung
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 1 ayat (2)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.
- Prastowo, A. 2010. *Menguasai teknik-teknik koleksi data penelitian kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, S. 2007. *Statistika untuk penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Torang, S. 2014. *Organisasi dan manajemen*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Pembangunan Desa No. 6 Tahun 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa: merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. PT. Raja Grafindon Persada. Jakarta.